Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia: Waktu Efektif yang Dibutuhkan

by Desi Aryani

Submission date: 05-Jul-2021 03:15PM (UTC+0700)
Submission ID: 1615898479
File name: 7._ARTIKEL_DESI_ARYANI_cek.docx (288.12K)
Word count: 5461
Character count: 35095

Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia: Waktu Efektif yang Dibutuhkan

Rice Price Control Instrument in Indonesia: Effective Time Needed

Desi Aryani
Dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya
Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Indralaya 30662, Sumatera Selatan, Indonesia
Email: desiaryaniz@yahoo.com

Diterima: 8 Maret 2021 Revisi: 16 Juni 2021 Disetujui: xxxxxxxxxxx 2021

ABSTRAK

Beras merupakan salah satu komoditas utama pembentuk inflasi. Stabilitas harga beras selalu berusaha dijaga pemerintah supaya berada sampai batas tertentu yang menguntungkan petani dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis selang waktu efektif yang dibutuhkan untuk pengendalian harga beras di Indonesia serta mengkaji kebijakan stabilisasi harga beras dengan pendekatan *Tinbergen Framework*. Penelitian menggunakan data sekunder *Time Series* dengan alat analisis *distributed lag model*. Hasil analisis menunjukkan pada variabel HPP beras tidak diperlukan selang waktu, HPP beras pada periode t sudah efektif berpengaruh secara langsung pada harga beras konsumen. Variabel operasi pasar tidak efektif pada *lag* berapapun. Variabel impor beras akan berpengaruh menurunkan harga beras konsumen pada *lag* 6. Pemetaan berdasarkan *Tinbergen Framework*, e*xogenous variables* terdiri dari: *policy instruments* (HPP Beras, Operasi Pasar, Impor Beras); *constraints* (ketepatan waktu pelaksanaan, ketepatan volume, kualitas beras, perilaku anti persaingan dari pedagang beras); dan *factors beyond control* (cuaca ekstrim, infrastruktur rusak). *Endogenous variables* berupa: *goals for target variables* (stabilitas harga beras konsumen); dan *Side effects* (menekan inflasi, stabilitas harga di tingkat produsen, terpenuhinya stok sebagai CBP di gudang Bulog, konsumen mendapatkan beras yang berkualitas dengan harga sesuai).

kata kunci: stabilitas harga beras; *Tinbergen Framework*; HPP beras; operasi pasar; impor beras.

ABSTRACT

Rice is one of the main commodities forming inflation. The government always tried to maintain rice price stability at a certain level that benefits both farmers and consumers. This study aims to analyze the effective time lag needed to control rice prices in Indonesia and to examine rice price stabilization policies with the tinbergen framework approach. The study used time series secondary data with distributed lag model analysis tools. The results show that there is no time lag for the rice HPP variable to affect consumer price. Rice HPP in period t has been effective in influencing directly to the consumer's rice price. Market operation variable was not effective at any lag. Rice import variable would be affect reducing consumer rice prices at lag 6. Mapping based on Tinbergen framework, exogenous variables consist of: policy instruments (Rice HPP, Market Operation, Rice Import); constraints (timeliness of implementation, volume accuracy, rice quality, anti-competitive behavior of rice traders); and factors beyond control (extreme weather, damaged infrastructure). Endogenous variables include: goals for target variables (stability of consumer rice prices); and side effects (suppressing inflation, stability of producer prices, the fulfillment of stocks as CBP in Bulog's warehouses, consumers getting quality rice at appropriate prices).

keywords: rice price stability; Tinbergen Framework; rice HPP; market operations; rice imports

I. PENDAHULUAN

Stabilitas dan tingkat harga beras akan mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan beras. Bahan pangan perlu selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak dan secara medis aman dikonsumsi. Ketersediaan bahan pangan pokok terutama beras dipengaruhi oleh besarnya produksi padi atau beras di suatu daerah. Di Indonesia, produksi beras terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS, tahun 2020 produksi padi Indonesia mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 31,33 juta ton beras (BPS, 2021).

Hampir seluruh daerah di Indonesia menghasilkan beras, tetapi tidak semua daerah mengalami surplus karena hasil produksi yang rendah tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsinya. Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di Asia Tenggara. Hal ini salah satunya disebabkan oleh budaya masyarakat Indonesia yang masih menganggap beras sebagai makanan pokok yang harus dikonsumsi setiap hari (Yustiningsih, 2012). Berdasarkan data OECD-FAO, 2018, konsumsi beras per kapita per tahun di Indonesia masih melebihi 100 kg. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya seperti Thailand dan Malaysia yang masing-masing hanya 99 kg dan 81 kg (Patunru dan Ilman, 2019).

Untuk menjaga keamanan pasokan beras, Indonesia terus mengimpor beras setiap tahun. Rata-rata impor beras Indonesia selama periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2017 mencapai lebih dari 1,2 juta ton setiap tahunnya. Selain itu, perbedaan harga yang signifikan antara harga beras dalam negeri dan harga internasional juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya impor. Dibandingkan harga beras di pasar internasional, harga beras Indonesia cenderung lebih tinggi (Patunru dan Ilman, 2019).

Ketidakstabilan harga beras di Indonesia terlihat dari semakin besarnya disparitas harga antara harga beras Indonesia dengan harga beras internasional. Berdasarkan data periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan tren harga beras Indonesia terus naik dari tahun ke tahun. Sedangkan mulai pertengahan tahun 2013 harga beras internasional cenderung mengalami penurunan (Aryani, dkk., 2017; Patunru dan Ilman, 2019). Tingkat fluktuasi harga beras di Indonesia cukup tinggi setiap tahunnya, hal ini berarti harga beras cenderung tidak stabil terutama harga beras di pulau-pulau yang defisit beras seperti Pulau Maluku dan Papua. Harga yang tidak stabil akan merugikan baik di tingkat petani maupun konsumen. Harga yang relatif stabil dan dijaga kewajarannya bagi produsen dan konsumen, akan lebih memberikan kepastian penghasilan dan insentif berproduksi pada petani dan sekaligus menjaga kelangsungan daya beli konsumen (Dawe dan Timmer, 2012; Hariadi dan Yamin, 2014).

Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang netral dimana harga beras domestik tidak memiliki rentang yang jauh dengan tingkat harga beras dunia dalam jangka panjang. Hal ini akan memberikan sinyal kepada petani mengalokasikan sumberdayanya untuk memproduksi beras serta menjamin masyarakat terutama masyarakat miskin tidak tersakiti dengan harga beras yang tinggi (McCulloch, 2008).

Beras merupakan salah satu komoditas utama pembentuk inflasi. Berbagai kebijakan stabilitas harga beras dibuat pemerintah supaya harga beras berada sampai batas tertentu yang menguntungkan petani dan konsumen. Pemerintah harus menghadapi dilema harga pangan dimana di satu sisi petani menginginkan harga beras tinggi, dan di sisi lain konsumen menginginkan sebaliknya (Timmer, Falcon dan Pearson, 1983 dalam Dorosh, 2008).

Di Indonesia kebijakan perberasan terbagi menjadi empat yaitu kebijakan

produksi, kebijakan harga, kebijakan distribusi, dan kebijakan impor (Firdaus, dkk., 2008). Tiga tujuan pokok kebijakan perberasan nasional adalah menjamin ketersediaan beras nasional, kestabilan harga, dan melindungi tingkat pendapatan petani (Suryana, dkk., 2014).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya misalnya, Puska Daglu BP2KP Kemendag (2015); Puska PDN BP2KP Kemendag (2015); Aryani, dkk. (2017), diketahui bahwa terdapat beberapa faktor instrumen kebijakan stabilisasi harga yang berpengaruh signifikan terhadap harga beras konsumen yaitu Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras, operasi pasar dan impor beras. Variabel operasi pasar dan impor beras tidak efektif dalam menstabilkan harga beras karena kurang tepatnya waktu dan kuantitas dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan operasi pasar dan impor beras tidak serta merta dapat menurunkan harga beras pada periode yang sama. Kebijakan ini akan efektif berpengaruh pada harga beras setelah beberapa periode berikutnya. Hal ini berarti bahwa instrumen kebijakan tersebut membutuhkan selang waktu untuk bisa berpengaruh terhadap harga yang berlaku (Puska Daglu BP2KP Kemendag, 2015; Aryani, dkk., 2017).

Penerapan instrumen kebijakan tentunya akan menimbulkan efek samping, baik itu buat produsen maupun konsumen. Dalam penerapannya juga akan menghadapi kendala-kendala yang dapat menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan diterapkannya kebijakan. Beberapa penelitian terdahulu memetakan hal-hal tersebut melalui pendekatan *Tinbergen framework of policy analysis* (Thorbecke & Hall, 1982 dalam Ellis, 1992). Penerapan kebijakan perberasan yang efektif akan menghasilkan tercapainya tujuan dibuatnya kebijakan tersebut. Pemerintah menerapkan kebijakan perberasan untuk mengatur ekonomi perberasan yang akan berdampak pada kesejahteraan produsen dan konsumen (Sembiring, dkk., 2010).

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis selang waktu (*lag*) yang dibutuhkan untuk efektivitas instrumen pengendalian harga beras di Indonesia; 2) mengkaji kebijakan stabilisasi harga beras dengan pendekatan *Tinbergen Framework*.

II. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Secara spesifik metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yang menggunakan alat analisis statistik dan ekonometrik dalam klasifikasi *Time series models* (Ethridge, 2004).

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Data yang digunakan untuk analisis merupakan data sekunder bulanan dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2019. Tahun 2010 dijadikan periode awal analisis dengan pertimbangan tahun 2010 dianggap lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya setelah ada lonjakan harga pangan dunia pada tahun 2007/2008. Data sekunder tersebut yaitu data harga beras konsumen (kualitas medium banyak beredar), HPP beras, operasi pasar, dan impor beras nasional (yang dilakukan oleh Bulog dan swasta). Data dikumpulkan dari beberapa instansi yaitu: Badan Pusat Statistik untuk data harga beras konsumen, HPP, impor beras nasional; dan Bulog untuk data operasi pasar.

Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel instrumen pengendalian harga beras di Indonesia yaitu HPP beras, operasi pasar, dan impor beras. Harga beras konsumen (HBK) merupakan fungsi dari HPP beras (HPP), operasi pasar (OPM), dan impor beras (IM). Secara matematis dibuat fungsi sebagai berikut:

$$HBK_t = f(HPP_t, OPM_t, IM_t) \quad (1)$$

Untuk menganalisis selang waktu (*lag*) yang dibutuhkan untuk efektivitas instrumen pengendalian harga beras di Indonesia maka fungsi harga beras konsumen pada persamaan 1 diubah ke dalam persamaan

dalam bentuk *distributed lag model* seperti persamaan 2 (Enders, 1995: Koutsoyiannis, 1978).

$$HBK_t = \alpha + \beta_0 HPP_t + \beta_1 HPP_{t-i} + \beta_2 OPM_t + \beta_3 OPM_{t-i} + \beta_4 IM_t + \beta_5 IM_{t-i} + e_t \quad (2)$$

Tanda dan parameter yang diharapkan dalam persamaan tersebut adalah:
$\beta_0, \beta_1 > 0$; $\beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5 < 0$

Dimana

- HBK_t : Harga beras konsumen periode t (Rp/kg)
- HPP_t : HPP Beras periode t (Rp/kg)
- OPM_t : Operasi pasar periode t (Ton/bln)
- IM_t : Impor beras periode t (Ton/bln)
- HPP_{t-i} : HPP Beras periode t-i (Rp/kg)
- OPM_{t-i} : Operasi pasar periode t-i (Ton/bln)
- IM_{t-i} : Impor beras periode t-i (Ton/bln)
- e : Variabel pengganggu
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- i : Periode waktu sebelum periode t (1,2,3,dst.)

Untuk mengukur efektivitas kebijakan digunakan nilai dan tingkat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen dari pendekatan analisis ekonometrika (Sanim, 1998 dan Simatupang, 2002 dalam Puska Daglu BP2KP Kemendag, 2015). Jika pengaruhnya signifikan dengan arah sesuai harapan, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dikatakan efektif. Analisis dilakukan dengan tidak menggunakan *lag*, menggunakan *lag* 1 dan seterusnya sampai memperoleh nilai *lag* yang memberikan arah sesuai harapan.

Untuk memperjelas kinerja dari instrumen kebijakan stabilisasi harga beras yang telah dilakukan pemerintah maka dilakukan pendekatan dengan *Tinbergen framework of policy analysis* (Thorbecke & Hall, 1982 dalam Ellis, 1992). Pendekatan ini dilakukan dengan memetakan *exogenous variables, relationship between variation "The Model", endogenous variables,* dan *ultimate goal*. *Tinbergen framework of policy analysis* dalam penelitian ini dirangkum dalam Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat keterkaitan antar variabel, dimana *exogenous variables* yang terdiri dari *policy instrumen, constraints*, dan *factors beyond control* secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi *endogenous variables*. Selanjutnya *endogenous variables* yang terdiri dari *goals for target variables* dan *side effect* akan mempengaruhi hasil akhir yaitu *ultimate goal* berupa *social welfare*.

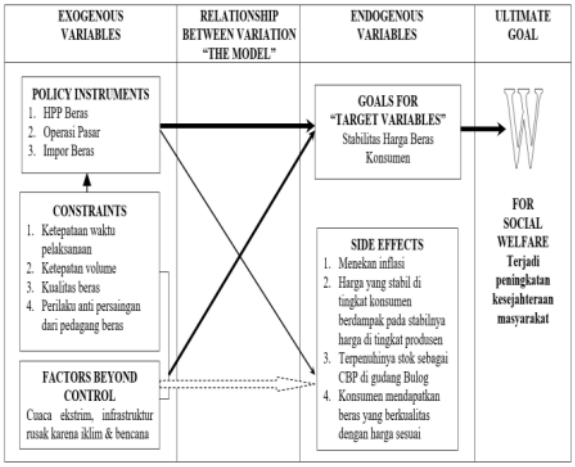

Sumber: Diadopsi dari Thorbecke & Hall (1982) dalam Ellis (1992)

Gambar 1. Analisis Kebijakan Stabilisasi Harga Beras dengan *Tinbergen framework*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Stabilisasi Harga Beras

Galtier (2009), berdasarkan studinya tentang manajemen instabilitas harga bahan pangan di negara berkembang, mengemukakan usaha stabilisasi harga dapat ditempuh melalui beberapa pendekatan kebijakan. Pertama melalui Kebijakan dengan tujuan menghilangkan hambatan yang bersifat spasial dan sementara yang dilakukan oleh pelaku pasar (produsen, konsumen dan pedagang), kebijakan ini dilakukan dengan perbaikan infrastruktur. Kedua melalui kebijakan

dengan tujuan mencegah instabilitas harga yang menyebabkan instabilitas pendapatan, contoh implementasi kebijakan ini antara lain melalui kontrak berjangka dan asuransi pertanian. Ketiga melalui kebijakan dengan tujuan untuk memastikan harga tidak melampaui batas tertentu, beberapa alternatif kebijakan ini bisa berbentuk harga dasar, harga atap atau batasan harga tergantung komoditinya. Kebijakan berfokus pada pengendalian produksi dan pengelolaan stok. Di Indonesia kebijakan seperti ini adalah kebijakan yang paling banyak diterapkan untuk mengatasi fluktuasi harga bahan pangan pokok. Keempat yaitu alat intervensi pemerintah melalui penerapan instrumen kebijakan dengan tujuan untuk membantu pendapatan rumah tangga pada saat harga mengalami kenaikan. Salah satu bentuk penerapan kebijakan ini adalah bantuan langsung untuk masyarakat miskin yang menjadi target kebijakan ini.

Stabilisasi harga pangan pokok menjadi fokus kebijakan pemerintah karena harga komoditas pangan pokok akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat (Nuryati, dkk., 2011). Harga riil beras di Indonesia setelah krisis keuangan setidaknya 30 persen lebih tinggi dari tren stabilnya pada 1975-1996. Selama periode 21 tahun, harga beras domestik sangat stabil, meskipun harga merespons dengan tepat surplus lokal dan defisit. Harga beras yang tinggi ternyata tidak membawa dampak terhadap peningkatan produktivitas petani. Harga beras yang lebih tinggi ternyata menghasilkan "*zero sum outcomes*" hal ini disebabkan setiap peningkatan pendapatan petani padi akan hilang karena sebagai konsumen beras, petani juga harus membayar harga beras lebih tinggi. Tidak ada "*spread effect*" atau multiplier efek tanpa adanya peningkatan produktivitas (Timmer, 2004).

Harga gabah dan beras antar waktu tanam dan panen masih terus berfluktuasi. Pada kondisi ini dilema yang dihadapi petani adalah mereka kesulitan membeli beras ketika harga tinggi, di lain waktu mereka merasa dirugikan dengan harga gabah yang jatuh ketika musim panen. Hal ini disebabkan karena petani juga adalah konsumen beras, 60 persen konsumen beras adalah petani dan keluarganya (Suryana, 2001). Jika terjadi peningkatan harga di tingkat produsen maka daya beli masyarakat (petani dan konsumen) akan menurun (Firdaus, dkk., 2008). Peningkatan harga beras memiliki dampak yang sangat nyata pada masyarakat miskin, banyak orang miskin adalah petani. Mengingat besarnya komposisi beras dalam pengeluaran makanan orang miskin di Asia, peningkatan harga beras yang tajam dapat mengurangi daya beli masyarakat miskin, mungkin mendorong mereka ke dalam kemiskinan atau mengancam ketahanan pangannya (McCulloch, 2008; Ivanic dan Martin, 2014; Patunru dan Ilman, 2019).

Di negara-negara miskin, stabilnya harga makanan pokok membantu mencegah petani miskin dan konsumen jatuh ke dalam perangkap kemiskinan. Selain itu juga akan mendorong investasi di tingkat pertanian dan mendorong investasi bidang ekonomi secara keseluruhan dengan mengurangi gangguan pada harga barang lain dan dengan mendorong stabilitas sosial dan politik. Karena manfaat ini, stabilisasi harga beras dalam negeri telah menjadi bagian integral dari visi pembangunan di Asia (Dawe dan Timmer, 2012).

Kebijakan adalah suatu peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan untuk diimplementasikan yang bertujuan mempengaruhi suatu keadaan. Kebijakan bermanfaat sebagai cara intervensi pemerintah untuk mempengaruhi perubahan sektoral di masyarakat. Berdasarkan perspektif dasar, kebijakan perberasan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga rezim yaitu: (i) Rezim Kebijakan Suportif dan Stabilisasi (1971-1997), pada periode ini harga, impor, dan penyaluran beras dalam negeri mutlak dikendalikan pemerintah melalui Bulog; (ii) Rezim Kebijakan Liberalisasi (1998-2000), dimana impor beras dibiarkan bebas dengan bea masuk nol persen; dan (iii) Rezim Kebijakan

Proteksi dan Promosi (2001-sekarang), dimana pengendalian impor beras dilakukan dengan mekanisme tarif dan non tarif (Puska Daglu BP2KP Kemendag, 2015; Hermawan, 2016).

Kebijakan harga produk pertanian yang ditetapkan pemerintah akan mempengaruhi harga yang diterima oleh petani maupun harga yang dibayar oleh konsumen. Harga produk pertanian memiliki tiga fungsi dalam sistem ekonomi, yaitu: (i) mengalokasikan sumberdaya pertanian; (ii) mendistribusikan pendapatan; dan (iii) sebagai faktor pendorong atau penghambat pembentukan investasi dan modal dalam pertanian. Ketiga fungsi ini juga merupakan sinyal, insentif, dan instrumen untuk alokasi sumberdaya dan pendapatan. Beberapa instrumen kebijakan harga yaitu: instrumen kebijakan perdagangan, kebijakan nilai tukar, pajak dan subsidi, intervensi langsung contohnya penetapan harga dasar dan harga atap (Ellis, 1992).

Salah satu kebijakan harga produk pertanian yang mendapat perhatian khusus adalah kebijakan harga beras dan gabah. Kebijakan ini dimulai tahun 1970-an yaitu kebijakan harga dasar gabah dan beras. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi petani ketika musim panen tiba. Selain itu juga ditetapkan kebijakan harga atap atau harga eceran tertinggi untuk memberikan perlindungan pada konsumen terutama pada saat musim paceklik. Kebijakan harga dasar gabah dan beras pertama kali dimuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 1973 tentang Pembelian Beras dalam Negeri untuk Tahun 1973/1974 yang dikeluarkan pada 14 Maret 1973. Dalam perkembangannya kebijakan harga dasar dan harga atap ini dihilangkan dan berganti dengan harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) yang selanjutnya menjadi harga pembelian pemerintah (HPP) (Amang dan Sawit, 2001).

HDPP merupakan kebijakan pengganti kebijakan harga dasar dan harga atap, pertama kali ditetapkan pada tahun 2002 melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2002, ketetapan ini mulai berlaku pada Januari 2003. Selanjutnya istilah HDPP berubah menjadi HPP, pertama kali ditetapkan pada Inpres Nomor 2 tahun 2005. Sampai tahun 2020, kebijakan HPP gabah/beras sudah beberapa kali ditetapkan. Hal ini dilakukan seiring dengan perubahan situasi perberasan dalam negeri, terutama akibat perkembangan harga yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penetapan HPP gabah/beras terbaru ditetapkan pada Maret 2020 melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras. Permendag ini merevisi besaran HPP dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Berdasarkan data dari Bulog tahun 2016, selama periode penetapan HPP 2002 sampai 2015, besaran HPP Gabah Kering Panen (GKP) naik rata-rata sekitar 15,00 persen per tahun, HPP Gabah Kering Giling (GKG) naik rata-rata sekitar 13,34 persen per tahun, dan HPP beras naik rata-rata sekitar 15,90 persen per tahun (Sawit, 2008; Suryana, dkk., 2014).

Tahun 2017 pemerintah mengeluarkan kebijakan perberasan yaitu Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (HET) yang tertuang dalam Permendag Nomor 57 Tahun 2017. Kebijakan ini membagi beras medium dan premium dengan pembagian HET menjadi beberapa daerah regional (kepulauan). Terdapat tiga HET yang ditetapkan untuk delapan wilayah kepulauan. HET terendah adalah Rp9.450 per kilogram (beras medium) dan Rp12.800 per kilogram (beras premium) untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan; Bali dan Nusa Tenggara; Sulawesi. HET tertinggi yaitu sebesar Rp10.250 per kilogram (beras medium) dan Rp13.600 per kilogram (beras premium) untuk wilayah Maluku dan Papua (Kementerian Perdagangan, 2017).

Kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah diatur dalam beberapa Inpres dan Permen, salah satunya tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Kebijakan ini diatur dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani,

stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan pemerintah. Pengadaan beras melalui impor dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok, dan CBP atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. Kebijakan pengadaan beras impor dilakukan oleh Bulog dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen. Berdasarkan Permendag Nomor 1 Tahun 2018, impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Bulog, impor beras dapat dilakukan oleh pihak swasta jika dipergunakan untuk keperluan bahan baku industri. Pemberlakuan kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk melindungi petani lokal (Patunru dan Ilman, 2019).

Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka stabilisasi harga beras adalah melalui kebijakan operasi pasar. Sekarang kebijakan operasi pasar dikenal dengan istilah Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Pada awalnya kebijakan operasi pasar terdiri dari Operasi Pasar Murni (OPM) dan Operasi Pasar Khusus (OPK). OPM merupakan bagian dari *general price subsidy* yang digunakan pada saat harga beras terlalu tinggi akibat adanya kelebihan permintaan di pasar. OPM dilaksanakan Bulog melalui penyaluran CBP sesuai dengan permintaan dari daerah. Sedangkan OPK adalah implementasi dari *targeted price subsidy*. Pada awal diterapkan, OPK bertujuan menyalurkan bantuan pangan pada masyarakat miskin yang rawan pangan setelah terjadinya krisis tahun 1998. Sejak tahun 2002 OPK dengan target masyarakat miskin diubah namanya menjadi Raskin (beras untuk keluarga miskin) (Firdaus, dkk., 2008).

Sejak tahun 2015 Program Raskin berubah nama menjadi Program Rastra (Beras Sejahtera). Mulai tahun anggaran 2017 penyaluran Rastra ditransformasi menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Rastra dan BPNT merupakan instrumen untuk penanggulangan kemiskinan, yang harus dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan daerah surplus dan defisit beras (Rachman, dkk., 2018).

Pada 3 Mei 2017 pemerintah membuat instrumen kebijakan baru yang disebut sebagai instrumen penegakan hukum. Instrumen ini diberi nama Satgas Pangan dengan salah satu tujuannya adalah untuk stabilisasi harga pangan. Beberapa tugas Satgas Pangan yaitu memantau harga pangan, memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, mengawasi rantai pasok, memastikan konsumen mendapatkan harga yang adil, dan melakukan penegakan hukum di bidang pangan. Satgas Pangan terdiri dari unsur Polri, Kementerian Dalam Negeri, Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Khudori, 2019).

Selanjutnya Khudori (2019), menjelaskan salah satu tugas Satgas Pangan adalah memantau kualitas beras yang diperdagangkan di pasar. Berdasarkan Permendag Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras, pedagang diwajibkan untuk memberikan label beras terkait merek dan jenis beras. Aturan ini berlaku untuk beras yang dijual dalam kemasan dengan jenis medium, premium, dan khusus. Sedangkan untuk beras curah yang dijual langsung ke konsumen tidak diperlukan pencantuman label.

3.2. Analisis Selang Waktu dalam Instrumen Pengendalian Harga Beras

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Firdaus, dkk., 2008; Puska PDN BP2KP Kemendag, 2015; Puska Daglu BP2KP Kemendag, 2015) diketahui bahwa kebijakan operasi pasar dan impor beras baru akan berdampak beberapa waktu setelah diterapkan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel operasi pasar dan impor beras berpengaruh signifikan tetapi koefisien hasil analisis tidak sesuai dengan tanda harapan, dimana koefisien hasil analisis menunjukkan nilai positif yang seharusnya bernilai negatif. Diperlukan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kebijakan supaya instrumen tersebut efektif berpengaruh. Tabel 1 menampilkan hasil estimasi *distributed lag model. Lag* yang digunakan untuk variabel operasi pasar dan impor beras adalah *lag* 1 sampai dengan 6.

Tabel 1. Hasil Estimasi *distributed lag model* Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia

Variabel	Koefisien β	Std. Error	t	Sig.
Konstanta	0,435	0,165	2,643	0,009
HPP_t	0,935	0,043	21,795	0,000
OPM_t	0,003	0,001	5,059	0,000
OPM_{t-1}	0,003	0,001	5,739	0,000
OPM_{t-2}	0,003	0,001	6,344	0,000
OPM_{t-3}	0,003	0,001	4,867	0,000
OPM_{t-4}	0,002	0,001	3,924	0,000
OPM_{t-5}	0,002	0,001	3,426	0,001
OPM_{t-6}	0,002	0,001	3,131	0,003
IM_t	0,027	0,006	4,815	0,000
IM_{t-1}	0,022	0,006	3,941	0,000
IM_{t-2}	0,019	0,006	3,390	0,001
IM_{t-3}	0,011	0,006	1,813	0,074
IM_{t-4}	0,002	0,006	0,403	0,688
IM_{t-5}	-0,006	0,006	-0,997	0,323
IM_{t-6}	-0,012	0,006	-2,020	0,048

Berdasarkan hasil estimasi *distributed lag model* pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa variabel HPP beras berpengaruh signifikan dan efektif berpengaruh pada periode t atau periode sekarang. Variabel impor beras berpengaruh signifikan dan efektif berpengaruh pada periode t-6 (*lag* 6). Sedangkan variabel operasi pasar berpengaruh signifikan tapi tidak efektif pada periode berapapun. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi dan tanda koefisien regresi (nilai Beta). Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α 0,05 berarti variabel berpengaruh signifikan dan tanda koefisien regresi sesuai tanda harapan berarti variabel efektif berpengaruh. Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda dan penggunaan *lag* 6 untuk variabel operasi pasar dan impor beras dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Analisis Estimasi *Distributed lag model* Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia

Variabel	Tanda Harapan	Koefisien β	t	Sig.
Konstanta		0,435	2,643	0,009
HPP_t	+	0,935	21,795	0,000
OPM_{t-6}	-	0,002	3,131	0,003
IM_{t-6}	-	-0,012	-2,020	0,048
F = 168,308 / sig. 0,000				
R^2 = 0,813				

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis didapatkan nilai R^2 sebesar 0,813. Hal ini berarti bahwa 81,3 persen variasi yang ada dapat dijelaskan oleh model sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang belum dimasukkan dalam model. Hasil Uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas (HPP beras, *lag* 6 volume operasi pasar, dan *lag* 6 volume impor beras) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (harga beras konsumen). Hal ini dapat dilihat dari nilai Uji F sebesar 168,308 dengan tingkat signifikansi 0,000. Secara parsial melalui uji t diketahui bahwa ketiga variabel bebas yaitu HPP beras, *lag* 6 volume operasi pasar, dan *lag* 6 volume impor beras secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Variabel HPP Beras dalam analisis ini tidak membutuhkan *lag* dikarenakan variabel HPP beras sudah berpengaruh signifikan dan bertanda positif sesuai dengan tanda harapan. Hal ini berarti bahwa variabel HPP dengan nilai pada periode t (periode

sekarang) sudah efektif berpengaruh secara langsung pada harga beras konsumen.

Tanda dan nilai koefisien variabel *lag* volume operasi pasar adalah positif. Hal ini masih tidak sesuai dengan harapan dimana tanda yang diharapkan adalah negatif dan berpengaruh signifikan. Tanda yang tidak sesuai hipotesis ini dapat disebabkan oleh kurang tepatnya waktu dan kuantitas beras yang disalurkan, operasi pasar dilakukan ketika harga sudah mengalami kenaikan sehingga pengaruh adanya operasi pasar menjadi positif (Aryani, dkk., 2017).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Rahmasuciana, dkk. (2015) mendapatkan hasil bahwa kuantitas operasi pasar murni (OPM) berpengaruh tidak signifikan terhadap harga beras dalam negeri. Khudori (2019) mengemukakan bahwa kebijakan harga tunggal yang berlaku menyulitkan pemerintah dalam intervensi harga melalui operasi pasar. Implementasi operasi pasar yang dilakukan hanya dengan satu jenis kualitas apalagi stok beras untuk operasi pasar biasanya adalah stok lama, akan sulit untuk bisa menghambat gejolak harga pada semua jenis beras yang ada di pasar. Operasi pasar sebagai salah satu instrumen pengendalian harga beras hanya dilakukan Bulog ketika ada permintaan dari pemerintah daerah. Secara makro operasi pasar tidak berpengaruh terhadap harga beras dalam negeri di tingkat nasional, operasi pasar hanya berpengaruh parsial pada daerah-daerah tertentu yang melakukan operasi pasar saja.

Berdasarkan hasil penelitian Puska PDN BP2KP Kemendag (2015), kebijakan operasi pasar dilakukan ketika harga beras mengalami kenaikan di tingkat pengecer pada waktu-waktu tertentu. Dampak operasi pasar beras akan terlihat dalam satu periode waktu berikutnya. Dibandingkan daerah surplus, maka pada daerah defisit memerlukan volume beras lebih besar untuk didistribusikan pada operasi pasar. Waktu intervensi pasar yang efektif yaitu pada musim paceklik dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sekitar bulan Desember dan Januari, Juni sampai Agustus. Yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan operasi pasar beras adalah waktu dan jumlah beras yang didistribusikan. Hal ini berarti dampak operasi pasar sangat tergantung dengan kuantitas dan waktu pelaksanaan operasi pasar.

Variabel *lag* volume impor beras sudah menunjukkan tanda yang sesuai dengan harapan yaitu negatif. Impor beras akan berpengaruh signifikan dan efektif menurunkan harga beras konsumen pada *lag* 6 yang berarti bahwa pengaruh impor beras akan terlihat pada enam bulan ke depan. Hal ini berarti pemerintah sebaiknya melakukan perencanaan impor sebelum harga diperkirakan akan naik. Harus ada *early warning* dari manajemen data penawaran dan permintaan beras untuk bisa mengestimasi kapan waktu harga beras akan bergerak naik.

Impor justru akan membuat harga semakin tidak terkendali jika tidak direncanakan dengan tepat tentang kapan waktu untuk melakukan impor, bahkan pada 2018 impor dilakukan saat panen raya. Hal ini terjadi karena kurang tepatnya waktu menetapkan keputusan impor beras pada tahun 2017 dimana pelaksanaan jatah impor 2017 dilakukan tahun 2018 (Khudori, 2019). Impor lebih efektif jika dilakukan sebelum harga merambat naik. Selama ini yang sering terjadi adalah impor dilakukan terlambat pada saat harga sudah terlanjur meningkat (Puska Daglu BP2KP Kemendag, 2015).

3.3. Analisis Kebijakan Stabilisasi Harga Beras dengan Pendekatan *Tinbergen Framework*

Untuk memperjelas kinerja dari instrumen kebijakan stabilisasi harga beras yang telah dilakukan pemerintah maka dilakukan pendekatan dengan *Tinbergen framework of policy analysis*. Rujukan kebijakan dalam penelitian ini adalah Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, kebijakan ini secara langsung dan tidak langsung akan terkait

dengan kebijakan stabilisasi harga beras. Instrumen kebijakan yang digunakan adalah HPP beras, operasi pasar, dan impor beras. Dalam memilih instrumen kebijakan terdapat lima pertanyaan yang harus diperhatikan (Ellis, 1992) yaitu: (i) apakah instrumen kebijakan sesuai untuk mencapai efisiensi dan keadilan; (ii) apakah instrumen kebijakan diaplikasikan pada level petani atau pada level saluran pemasaran. (iii) Apakah instrumen kebijakan adalah instrumen harga atau instrumen lembaga atau instrumen teknologi; (iv) apakah instrumen kebijakan diberlakukan untuk komoditas spesifik atau berlaku secara umum; dan (v) apakah instrumen kebijakan adalah kebijakan pasar komoditas atau kebijakan perdagangan atau kebijakan makro ekonomi.

Instrumen kebijakan yang dianalisis disini adalah instrumen harga yang diterapkan untuk komoditas spesifik beras yang merupakan kebijakan pasar komoditas. HPP beras diberlakukan di tingkat petani, sedangkan operasi pasar dan impor beras di tingkat saluran pemasaran. Pemerintah selalu berusaha untuk menjaga harga beras berada pada tingkat yang menguntungkan petani dan konsumen. Di Indonesia dua kondisi ini sulit untuk dicapai, contohnya pada kebijakan HPP beras yang dirasakan tidak berpihak kepada petani karena penentuan HPP lebih didasarkan pada tingkat inflasi bukan pada biaya produksi yang dikeluarkan petani. Penentuan HPP oleh pemerintah diharapkan dapat membantu petani dalam menstabilkan harga dan memenuhi persediaan beras mereka di musim paceklik. Pada kenyataannya kesejahteraan petani tidak mengalami peningkatan, petani dirugikan oleh kebijakan tersebut (Sawit dan Halid, 2010).

HPP yang ditetapkan pemerintah selalu berada di bawah harga riil, bahkan HPP cenderung tidak merespon perubahan harga yang terjadi di pasar. HPP baik gabah maupun beras tidak mengalami perubahan selama periode 2010-2011, 2012-2014, dan 2015-2019, tidak dinamis mengikuti perubahan harga di pasar yang terus meningkat. Harga riil gabah dan beras yang berada jauh di atas HPP menyebabkan Bulog kesulitan dalam menyerap gabah dan beras petani. Hal ini menyebabkan Bulog melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan CBP. Mekanisme menaikkan HPP gabah dan beras sebaiknya dilakukan pemerintah setiap tahun untuk menyerap gabah dan beras petani yang diperlukan untuk CBP. HPP multikualitas sebaiknya diterapkan pemerintah sebagai jaminan harga sehingga menjadi kepastian petani untuk melakukan produksi sesuai kualitas (Maulana, 2012).

Implementasi kebijakan akan menghadapi kendala, dalam pemetaan kendala terbagi menjadi 2 klasifikasi yaitu: (i) kendala spesifik, instrumen yang digunakan langsung mengarah pada perubahan teknis; dan (ii) kendala umum, membuat instrumen yang dapat menyelesaikan kendala tersebut. Kendala bersifat relatif dan absolut, bersifat relatif misalnya keterbatasan anggaran. Kendala bersifat absolut misalnya iklim, bagaimana antisipasi kebijakan untuk menghindari dampak negatifnya. Faktor-faktor diluar kendali manusia keberadaannya hanya bisa dilakukan pencarian strategi untuk menghindar dari faktor-faktor tersebut. Ada empat kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan stabilisasi harga yaitu ketepatan waktu pelaksanaan, ketepatan volume, kualitas beras, dan adanya perilaku anti persaingan dari pedagang beras. Sedangkan faktor-faktor di luar kendali yaitu cuaca ekstrim (perubahan iklim) dan infrastruktur yang rusak karena iklim dan bencana sehingga menghambat implementasi kebijakan.

Ketepatan waktu pelaksanaan dan ketepatan volume dalam penerapan kebijakan dapat diatasi dengan cara melakukan estimasi kapan harga diperkirakan akan naik dan volume diperkirakan sesuai dengan kebutuhan. Eksekusi kebijakan dilaksanakan pada saat harga belum mengalami kenaikan, karena kebijakan membutuhkan selang waktu untuk efektif mengendalikan harga (Firdaus, dkk., 2008; Puska PDN BP2KP Kemendag, 2015;

Puska Daglu BP2KP Kemendag, 2015). Kualitas beras dan adanya perilaku anti persaingan dari pedagang beras dapat dipantau melalui tugas Satgas Pangan. Jika terjadi kenaikan harga maka Satgas Pangan akan melakukan penyelidikan penyebab kenaikan harga. Pelaku usaha terutama yang menjadi penguasa pasar akan diawasi dengan ketat untuk menghindari adanya kecurangan dalam pasar. Satgas Pangan akan mengecek stok di gudang distributor, mekanisme ditribusi, dan menyelidiki pelaku pasar dari produsen, distributor, dan pedagang (Khudori, 2019).

Tujuan utama dari instrumen kebijakan stabilisasi harga beras (HPP beras, operasi pasar, dan impor beras) adalah stabilitas harga beras konsumen. Dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat mengendalikan harga beras di tingkat konsumen. Terdapat dua macam tujuan dalam merumuskan kebijakan yaitu efisiensi dan keadilan. Efisiensi kebijakan tercapai jika dapat diperoleh hasil maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Tujuan pencapaian kebijakan biasanya mengarah pada pertumbuhan ekonomi, tujuan ini pada dasarnya bersifat objektif. Tujuan keadilan mengacu kepada pendistribusian output yang dihasilkan dalam perekonomian kepada individu atau kelompok tersebut. Tujuan pencapaiannya sering disebut distribusi pendapatan, tujuan keadilan ini bersifat subjektif (Ellis, 1992).

Harga beras yang terkendali akan menekan inflasi karena beras merupakan salah satu faktor penentu angka inflasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penerapan HPP yang efektif akan berdampak pada kemampuan Bulog untuk menyerap gabah dan beras dari petani sehingga stok sebagai CBP di gudang Bulog dapat terpenuhi (Malian, dkk., 2004; Maulana, 2012).

Adanya kendala dan faktor di luar kendali sebagai tantangan bagi implementasi instrumen kebijakan akan menimbulkan efek samping jika kebijakan berhasil diterapkan yaitu: (i) menekan inflasi; (ii) harga yang stabil di tingkat konsumen berdampak pada stabilnya harga di tingkat produsen; (iii) terpenuhinya stok sebagai CBP di gudang Bulog; dan (iv) konsumen mendapatkan beras yang berkualitas dengan harga sesuai. Efek samping akan terjadi selaras dengan tercapainya tujuan akhir yaitu kesejahteraan sosial berupa terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Waktu yang dibutuhkan untuk efektivitas instrumen pengendalian harga beras di Indonesia berbeda-beda antar variabel yaitu dari periode t sampai periode t-6 (*lag* 6). Variabel HPP beras tidak diperlukan selang waktu. Variabel HPP beras dengan nilai pada periode t (periode sekarang) sudah efektif berpengaruh pada harga beras konsumen. Variabel operasi pasar tidak efektif pada lag berapapun. Variabel impor beras akan berpengaruh menurunkan harga beras konsumen pada *lag* 6.

Empat kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan stabilisasi harga yaitu ketepatan waktu pelaksanaan, ketepatan volume, kualitas beras, dan adanya perilaku anti persaingan dari pedagang beras. Sedangkan faktor-faktor di luar kendali yaitu cuaca ekstrim (perubahan iklim) dan infrastruktur yang rusak karena iklim dan bencana sehingga menghambat implementasi kebijakan. Variabel endogen dalam analisis ini adalah tujuan yaitu stabilitas harga beras konsumen. Efek samping yang akan timbul jika kebijakan berhasil diterapkan adalah: (i) menekan inflasi; (ii) harga yang stabil di tingkat konsumen berdampak pada stabilnya harga di tingkat produsen; (iii) terpenuhinya stok sebagai CBP di gudang Bulog; dan (iv) konsumen mendapatkan beras yang berkualitas dengan harga sesuai. Tujuan akhir dari penerapan kebijakan yaitu kesejahteraan sosial berupa terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sebaiknya menjaga kestabilan harga beras dengan

memperhatikan ketepatan waktu dan besaran kenaikan HPP, ketepatan waktu dan kuantitas dalam kebijakan operasi pasar dan impor beras. Perlu ada metode lain dari yang selama ini telah dilakukan untuk mengendalikan harga beras konsumen melalui operasi pasar. Waktu, jumlah, kualitas dan saluran operasi pasar perlu dilakukan secara tepat. Waktu intervensi pasar yang efektif yaitu pada musim paceklik dan Hari Besar Keagamaan Nasional. Untuk kebijakan impor pemerintah sebaiknya melakukan perencanaan impor, sekitar 6 bulan, sebelum harga diperkirakan akan naik. Harus ada *early warning* dari manajemen data penawaran dan permintaan beras berbasis waktu untuk bisa mengestimasi kapan harga akan bergerak naik.

DAFTAR PUSTAKA

Amang, B. dan M. H. Sawit. 2001. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi*. IPB Press. Bogor.

Aryani, D., R. S. Natawidjaja, T. I. Noor, dan A. Mulyana. 2017. The Effectiveness of Rice Price Stabilization Policy In Indonesia. *International Journal of Science and Research*, 6(10):1060-1063.

BPS. 2021. Berita Resmi Statistik No. 22/03/Th. XXIV, 1 Maret 2021.

Dawe, D. dan C. P. Timmer. 2012. Why Stable Food Prices Are a Good Thing: Lesson from Stabilizing Rice Prices in Asia. *Global Food Security*, 1: 127-133.

Dorosh, P. A. 2008. Food Price Stabilisation and Food Security: International Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1):93–114.

Ellis, F. 1992. *Agricultural Policies in Developing Countries*. Cambridge University Press. New York.

Enders, W. 1995. *Applied Econometric Time Series*. John Wiley. New Jersey.

Ethridge, D. 2004. Research Methodology in Applied Economics, Second Edition. Blackwell Publishing. Iowa.

Firdaus, M., L.M. Baga dan P. Pratiwi. 2008. *Swasembada Beras dari Masa ke Masa: Telaah Efektivitas Kebijakan dan Perumusan Strategi Nasional*. Institut Pertanian Bogor Press. Bogor.

Galtier, F. 2009. How to Manage Food Price Instability in Developing Countries. CIRAD, UMR MOISA, Montpellier F-34000. France.

Hariadi, S.S. dan A. Yamin. 2014. *Kebijakan Perberasan dan Nasib Petani Kecil, dalam Buku Ekonomi Perberasan Indonesia*. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Bogor.

Hermawan, I. 2016. Kebijakan Perberasan Indonesia dan Solidaritas Pangan ASEAN. *Politica*, 7(1):102-120.

Ivanic, M. dan W. Martin. 2014. *Rice Price Shocks: Impacts on the Poor. Rice In The Shadow Of Skyscrapers - Policy Choices in a Dynamic East and Southeast Asian Setting*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Roma.

Kementerian Perdagangan. 2017. Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Khudori, 2019. Kaji Ulang Kebijakan Perberasan. *Pangan*, 28(1):57-72.

Koutsoyiannis, A. 1978. *Theory of Econometrics*. Harper & Row Publishers, Inc. Barnes & Noble Import Division. New York.

Malian, A.H., S. Mardianto, dan M. Ariani. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi, Konsumsi dan Harga Beras Serta Inflasi Bahan Makanan. *Jurnal Agro Ekonomi*, 22(2):119-146.

Maulana, M. 2012. Prospek Implementasi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Multikualitas Gabah dan Beras di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(3):211-223.

McCulloch, N. 2008. Rice Prices and Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1):45–63.

Nuryati, Y., Y.H. Nur dan D.W. Prabowo. 2011. *Faktor Penentu Instabilitas Harga Produk Berbasis Impor (Kedele dan Gula)*. Pusat

Pengkajian dan Kebijakan Perdagangan dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Patunru, A. dan A.S. Ilman. 2019. *Ekonomi Politik Kebijakan Beras di Indonesia: Perspektif Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Makalah Diskusi No.6. Center for Indonesian Policy Studies. Jakarta.

Pusat Kebijakan Perdagangan dalam Negeri (Puska PDN), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan. 2015. *Laporan Akhir Analisis Efektifitas Operasi Pasar Beras*. Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri (Puska Daglu), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan. 2015. *Laporan Akhir Kajian Efektivitas Impor Produk Pangan dalam Rangka Stabilisasi Harga*. Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Rachman, B., A. Agustian, dan Wahyudi. 2018. Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1):1-18.

Rahmasuciana, D. Y., D. H. Darwanto, dan Masyhuri. 2015. Pengaruh Pengadaan Beras dan Operasi Pasar Terhadap Harga Beras dalam Negeri. *Agro Ekonomi*, 26(2):129-138.

Sawit, M.H. 2008. Perum Bulog dalam Inpres Perberasan No.3/2007: Evaluasi Kebijakan dan Implementasinya. *Pangan*, Edisi No.50(17):9-29.

Sawit, M.H. dan Halid, H. 2010. *Arsitektur Kebijakan Beras di Era Baru*. IPB Press. Bogor.

Sembiring, S.A., Harianto, H. Siregar, dan B. Saragih. 2010. Implementasi Kebijakan Perberasan di Tingkat Petani: Kinerja dan Perspektif ke Depan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(4):339-361.

Suryana, A. 2001. Melindungi Produsen dan Konsumen. *Majalah Agribisnis*, Vol. 12 Tahun 2001. Jakarta.

Suryana, A., B. Rachman, M. D. Hartono. 2014. Dinamika Kebijakan Harga Gabah dan Beras dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 7(4):155-168.

Timmer, C. P. 2004. *Food Security in Indonesia: Current Challenges and the Long-Run Outlook*. Working Paper Number 48 November 2004. Washington DC. Center for Global Development.

Yustiningsih, F. 2012. *Analisa Integrasi Pasar dan Transmisi Harga Beras Petani-Konsumen di Indonesia*. Tesis. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

BIODATA PENULIS

Desi Aryani dilahirkan di Palembang, 22 Desember 1981. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya pada tahun 2003, pendidikan S2 di Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009, dan pendidikan S3 di Program Studi Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran pada tahun 2017.

Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia: Waktu Efektif yang Dibutuhkan

ORIGINALITY REPORT

7%	8%	1%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.jurnalpangan.com Internet Source	2%
2	mahasiswaabadikampuskehidupan.blogspot.com Internet Source	1%
3	bppp.kemendag.go.id Internet Source	1%
4	repository.ipb.ac.id Internet Source	1%
5	ejurnal.litbang.pertanian.go.id Internet Source	1%
6	repository.unja.ac.id Internet Source	1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		